

# Jejak Pragmatisme dalam Politik di Indonesia (Era 2009 – 2017)

Miftah Faried Hadinatha\*

IAIN Samarinda

Email: [miftahfaried.hadinatha@gmail.com](mailto:miftahfaried.hadinatha@gmail.com)

## Abstract

*This paper will analyze pragmatism in the political world in Indonesia. Pragmatism is a modern philosophical movement, it was initiated in United States, by C. S. Pierce who was inspired by Immanuel Kant. Pragmatism developed through the thoughts of some figures such as John Locke, Gorge Berkley, David Hume, William James and John Dewey. Pragmatism assumes that truth, meaning and the value of an idea must be based on practical aspects. Based on this assumption, the author has a hypothesis that what happens in the political world in Indonesia is full of pragmatism. At least this condition can be found in several important aspects such as; the attitude of those politicians that looks massively toward the elections, the party coalitions, while serving in government and the culture of political dynasties. This phenomenon describe that politics in Indonesia is in degradation of ethical values, even from the state of ideology (Pancasila), norms of life and especially from the religious side. This pragmatic attitude is allegedly close to hedonism. The paper was completed with a literature review, by referring to the news about politics in Indonesia since 2009 until 2017. After reviewing an authoritative reference, the authors conclude that pragmatism was ingrained in the practice of political life in Indonesia. Indeed the practice of pragmatic politics is not hesitant to do by who has an interest in politics. Surely this will damage the order of life, and certainly also in the contrary to the values of religiosity, especially Islam as the teachings adopted by the majority of pragmatic political actors.*

**Keywords:** Pragmatism, Politic, Indonesia, Ethic, Value.

## Abstrak

*Tulisan ini akan menganalisa jejak pragmatisme dalam dunia politik di Indonesia. Pragmatisme sendiri merupakan gerakan filsafat abad modern, lahir di Amerika Serikat, dicetuskan oleh C.S. Pierce yang mendapat inspirasi dari pemikiran Immanuel Kant. Ia berkembang melalui pemikiran-pemikiran sejumlah tokoh seperti John Locke, Gorge Berkley, David Hume, William James dan John Dewey. Dalam perkembangannya, pragmatisme berasumsi bahwa kebenaran, arti, nilai dari suatu gagasan harus berdasarkan dari segi*

---

\* Jl. H. A. M. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251.

praktisnya. Berdasarkan asumsi ini, penulis memiliki sebuah hipotesis bahwa apa yang terjadi dalam dunia perpolitikan di Indonesia sarat akan nilai pragmatisme. Hal itu setidaknya dapat dilihat dalam beberapa aspek penting seperti; perilaku pemain politik yang terlihat sangat masif menjelang pemilu, koalisi partai, perilaku politikus saat menjabat di kursi pemerintahan dan budaya dinasti politik. Fenomena ini kemudian melahirkan citra bahwa politik di Indonesia berada pada kondisi degradasi akan nilai etika, baik dari ideologi negara (Pancasila), norma-norma kehidupan dan terutama dari sisi religius. Sikap pragmatis seperti ini pun disinyalir dekat dengan hedonisme. Makalah ini diselesaikan dengan kajian literatur, merujuk pada berita seputar politik di Indonesia tahun 2009 hingga 2017. Setelah menelaah melalui sumber rujukan yang otoritatif, penulis berkesimpulan bahwa pragmatisme sudah mendarah daging dalam praktik kehidupan politik di Indonesia. Bahkan praktik politik yang pragmatis ini tidak segan-segan dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam dunia politik. Tentunya ini akan merusak tatanan kehidupan, dan pastinya juga bertentangan dengan nilai-nilai religiusitas, terutama Islam sebagai ajaran yang dianut oleh mayoritas pelaku politik pragmatis itu.

**Kata Kunci:** Pragmatisme, Politik, Indonesia, Etika, Nilai.

## Pendahuluan

Tulisan ini mencoba membuktikan sejauh mana pragmatisme masuk dalam politik di Indonesia. Sebab jika berkaca pada negara seperti Amerika, maka dapat dilihat negara tersebut telah memegang teguh ajaran pragmatisme dalam setiap aspeknya.<sup>1</sup> Bahkan pragmatisme sudah menjadi *way of life* bangsa Amerika, terutama sikap politik luar negerinya melalui diplomasi politik yang pragmatis.<sup>2</sup> Mencairnya hubungan diplomatik Amerika dan Iran misalnya, dipandang sebagai bentuk pragmatisme politik luar negeri Amerika. Namun, pragmatisme yang pernah dilakukan Amerika tidak sepenuhnya memberi manfaat. Amerika pernah mengalami pengalaman pahit terkait perang di Afganistan dan Irak yang menyebabkan kerugian besar bagi Amerika.

Secara umum sikap ini telah dipraktikkan pada hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Tesis ini dapat dilihat dalam konteks mikro. Misalnya indikasi perilaku aktor politik yang kadang menghalalkan segala cara demi kepentingan pilkada, ada juga partai politik dituntut untuk beradaptasi dengan cara tawar-menawar

<sup>1</sup> Albertine Minderop, *Pragmatisme: Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*, Ed. I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 117.

<sup>2</sup> Saomi Rizqiyanto, "Kesepakatan Geneva Sebagai Bentuk Pragmatisme Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah," dalam *Jurnal Salam*, Vol. II, No. II, (T.K: T.P, 2015), 116.

politik yang memberinya keuntungan.<sup>3</sup> Hasil yang diperoleh pun tidak selamanya memberikan efek baik, justru menyebabkan kerugian bagi rakyat. Sebab sampai saat ini, rakyat belum merasakan manfaat sepenuhnya dari kekuasaan. Yang terjadi justru parpol melahirkan politikus yang siap berkuasa, memperkaya diri, tanpa visi, serta moralitas.<sup>4</sup> Padahal aktor politik merupakan peran penentu baik atau tidaknya roda politik itu sendiri.<sup>5</sup>

Jika dilihat sekilas, sikap pragmatis di Indonesia lebih tertuju pada kepentingan kekuasaan. Untuk mencapai itu ideologi partai dilupakan, lantas pelaku politik pragmatis ini berpikir bagaimana cara merebut kekuasaan.<sup>6</sup> Meminjam istilah Kuskridho, aktivitas semacam ini disebut dengan politik kartel.<sup>7</sup> Yaitu politik tidak lagi mengurus kepentingan publik, melainkan berprofesi untuk mengurus kepentingan dalam dirinya sendiri. Seumpama dengan itu, kepemimpinan partai politik menjadi kian sulit untuk dipisahkan antara pribadi-pribadi yang menjadi pemimpinya.<sup>8</sup> Citra ini kemudian menunjukkan dunia politik di Indonesia, berada pada masa hilangnya nilai etika, baik yang berasal dari ideologi (Pancasila), ataupun norma-norma politik lainnya. Maka tidak heran kalau sikap pragmatis seperti ini lebih dekat dengan perilaku hedonis.<sup>9</sup>

Peristiwa di atas, dapat pula dilihat dari betapa buruknya jalan yang ditempuh oleh caleg. Misalnya membeli suara atau menyogok para anggota dewan agar mau memberi dukungan kepadanya.<sup>10</sup> Ada juga yang menghidupi partai dengan memanfaatkan elit-elit partai yang duduk di pelbagai lembaga negara, termasuk kementerian dan

<sup>3</sup> M. Faishal Aminuddin, "Matc-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009," dalam *Jurnal Politik*, Vol. I, No. I, (T.K: T.P, 2015), 52.

<sup>4</sup> Syamsuddin Haris, *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, Ed. I, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), xi.

<sup>5</sup> Firman Noor, "Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi," dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. XXIV, No. I, (T.K: T.P, 2014), 58.

<sup>6</sup> Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 2017), 181.

<sup>7</sup> Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, (Jakarta: KPG, 2009), 22.

<sup>8</sup> Thomas Meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, Cet. III, 2012), 22.

<sup>9</sup> Sonny Keraf, *Pragmatisme Menurut William James*, (Yogyakarta: Kanisus, Cet. I, 1987), 120.

<sup>10</sup> Leo Agustino dan Indah Fitriani, *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2017), 105.

BUMN.<sup>11</sup> Salah satu akibatnya, terjadilah kericuhan yang sangat memalukan seperti saat proses pemilihan ketua DPR-RI, 2014 lalu. Semua ini, merupakan peristiwa politik yang menggambarkan kesan negatif bagi publik.

Berangkat dari kondisi di atas, maka tulisan ini hendak menjelaskan sekaligus mengungkapkan, sampai sejauh mana pragmatisme menjalar, menyusup ke dalam politik di Indonesia.

### Sekilas tentang Pragmatisme

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, *pragma* berarti perbuatan atau tindakan. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan *pragmatic* yang berkenaan dengan hasil praktik.<sup>12</sup> Sedangkan *Encyclopedia of Knowledge* menyatakan, pragmatisme adalah “a philosophical movement, that holds that both the meaning and the truth of any idea are functions of its practical outcome.”<sup>13</sup> Terjemahan bebasnya yaitu, sebuah gerakan filosofis, yang menyatakan makna dan kebenaran dari setiap gagasan adalah fungsi dari hasil praktisnya.

Jika dikaitkan dengan etika, maka pragmatisme akan memberi pengertian baru. Antara pragmatisme dan etika akan menghasilkan utilitarianisme yang memandang baik dan buruknya tindakan manusia dari segi manfaatnya.<sup>14</sup> Secara substansi, berarti memang ada persamaan antara pragmatisme dengan utilitarianisme. Yaitu sama-sama ingin mencapai kepuasan, manfaat, dan kebahagiaan. Maka tidak heran jika pragmatisme memandang hal yang baik, bermoral adalah sesuatu yang memberikan kehidupan yang lebih memuaskan. Adapun etika terfokus pada tujuan dan tidak hanya terfokus pada masalah benar atau salah, ini sebagaimana pendapat Pierce. Masalah mendasar etika adalah pada apa yang telah disiapkan seseorang dengan hati-hati sebagai ungkapan apa

<sup>11</sup> *Ibid.*, 132.

<sup>12</sup> Zaprulkhan, *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*, Ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. III, 2016), 116.

<sup>13</sup> Toive Aartolahti, dkk, *Grolier: Encyclopedia of Knowledge*, Vol. XV, (United States: Academic American Encyclopedia, 1997), 173.

<sup>14</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisus, 1991), 122.

yang ingin dilakukan dan apa tujuannya.<sup>15</sup>

Sementara Richard Rorty, seorang penerus tradisi pragmatisme Amerika punya pendapat menarik terkait etika dan pragmatisme. Baginya, seseorang tidak perlu hal-hal metafisik, seperti Tuhan untuk memiliki etika dan moral yang baik.<sup>16</sup> Pernyataan ini seperti diinspirasi oleh salah satu pengembang pragmatisme sebelumnya, John Dewey. Menurutnya tidak ada nilai keagamaan, kaidah moral dan etika yang tetap dan mutlak.<sup>17</sup> Sehubungan dengan itu, dapat dipahami bahwa pragmatisme menampilkan ketiadaan keterlibatan Tuhan dari perilaku. Dengan bahasa lain disebut sekuler. Jika dihubungkan dengan perilaku politik, maka pragmatisme adalah sebuah perilaku politik yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan praktis ketimbang tujuan-tujuan yang bersifat ideologis.<sup>18</sup>

Etika kaum pragmatis, berpendapat bahwa yang baik adalah yang dapat dilaksanakan dan dipraktekkan, mendatangkan yang positif dan kemajuan hidup.<sup>19</sup> Dengan begitu, baik buruknya perilaku dan cara hidup dinilai atas dasar praktisnya, akibat tampaknya, manfaat bagi orang yang bersangkutan dan dunia sekitarnya.

Pragmatisme pada mulanya lahir di Amerika Serikat. Pencetusnya yaitu C. S. Pierce (terinspirasi dari Immanuel Kant), lalu dipopulerkan oleh William James dan John Dewey. Sebelum mereka, John Locke, Gorge Berkley dan David Hume mempunyai sumbangan yang sangat berarti dalam pemikiran pragmatis ini.<sup>20</sup> Pragmatisme merupakan gerakan filsafat abad ke-19 dan ke-20, yang menekankan interpretasi ide-ide melalui

---

<sup>15</sup> Arthur W. Burk, *The Collected Papers of Charles Sanders Pierce*, Vol. III, (Cambridge, Harvard University Press, 1958), 116.

<sup>16</sup> Richard Rorty, *Truth and Progress*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 185.

<sup>17</sup> Uyoh Sadulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Alfa Beta, 2007), 123.

<sup>18</sup> Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction*, (Hampshire and London, The Macmillan Press Ltd, 1992), 317.

<sup>19</sup> A. Mangun Harjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A Sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisus, 1996), 189.

<sup>20</sup> Frederick Copleston, *A History Philosophy*, (London: Burns and Dates, 1966), 342.

konsekuensi-konsekuensinya.<sup>21</sup>

Pragmatisme tak dapat dilepaskan dari keberadaan dan perkembangan ide-ide sebelumnya di Eropa.<sup>22</sup> Sebagaimana tidak bisa diingkari pula adanya pengaruh dan timbal baliknya terhadap ide-ide yang dikembangkan berikutnya di Eropa.<sup>23</sup> Menurut Milton Munitz pragmatisme merupakan aliran filsafat yang muncul pertama kali pada masa kontemporer.<sup>24</sup>

Pada perkembangannya, pragmatisme kemudian masuk dalam tipologi untuk menilai suatu kebenaran. Sehingga dalam filsafat, pragmatisme dikategorikan sebagai teori kebenaran. Ukurannya yaitu ketika kebenaran bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.<sup>25</sup> Dalam konsepnya, pragmatisme menyatakan ukuran kebenaran diuji melalui dapat tidaknya dilaksanakan dan direalisasikan untuk membawa dampak positif, kemajuan, dan manfaat.<sup>26</sup> Lebih jelasnya dapat disebut pragmatisme lalu memandang kebenaran, arti, atau nilai, suatu gagasan harus berdasarkan dari segi praktisnya.<sup>27</sup>

Latar belakang tipologi ini diawali saat dunia memasuki masa pencerahan di abad XVIII. Pada masa itu, manusia memusatkan perhatian kepada kehidupan dunia dari pada akhirat. Atau dengan kata lain, memisahkan diri dari pengaruh gereja.<sup>28</sup> Kemudian dunia filsafat melahirkan dua aliran berbeda, yaitu rasionalisme dan empirisme. Akhir abad XIX hingga XX, dunia filsafat memasuki masa kontemporer. Filsafat kontemporer mengacu pada arti proses dan prosedur sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan.

<sup>21</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, Cet. IV, 2005), 878.

<sup>22</sup> Empirisme dan Materialisme. Lihat: Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, "Aliran Pragmatisme dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Harati*, Vol. VII, No. XIII, (T.K: T.P, 2016), 11.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 12.

<sup>24</sup> Milton K. Munitz, *Contemporary Analytic Philosophy*, (New York: Mcmillan Publishing Company, 1981), 8-9.

<sup>25</sup> Fauziah Nurdin, "Kebenaran Menurut Pragmatisme dan Tanggapannya Terhadap Islam," dalam *Jurnal Islam Futura*, Vol. XIII, No. II, (T.K: T.P, 2014), 185.

<sup>26</sup> A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam...*, 89.

<sup>27</sup> Zaprul Khan, *Filsafat...*, 116.

<sup>28</sup> Rodliyah Khuza'i, *Dialog Epistemologi Mohammad Iqbal dan Charles S. Pierce*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 11.

Selanjutnya dari sanalah, lahir filsafat pragmatisme yang dicetuskan oleh Pierce. Filsafat ini digunakan Pierce untuk mencari sekaligus mendatangkan kebenaran. Kemudian dalam masyarakat Amerika yang menganut paham pragmatisme, kedudukan seseorang diukur dari banyaknya materi.<sup>29</sup> Sebab individu yang memiliki banyak materi dianggap berprestasi. Mereka juga memiliki banyak kebebasan, dan dapat memengaruhi orang lain baik langsung dan tidak langsung.

Oleh pencetus dan pengembangnya, filsafat ini juga menyentuh pada masalah moral atau etika. Maka kemudian, filsafat ini tidak hanya digunakan untuk mencari kebenaran, melainkan juga menentukan etika dengan mempertimbangkan kepuasan sebagai tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami ternyata pragmatisme tidak hanya digunakan dalam hal kebenaran. Akan tetapi juga bisa diterapkan dalam menilai suatu etika. Untuk itu dalam konteks etika, dapat diketahui tentang katagori atau pembagian pragmatisme dalam memandang etika, yaitu; pragmatisme utilitarian, sekuler, dan relatif.

Pragmatisme utilitarian merupakan sistem etika yang mengukur buruknya tindakan berdasarkan hasil. Paham ini erat kaitannya dengan Jeremy Bentham, menurutnya suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, tidak dianggap kriminal.<sup>30</sup> Jika dihubungkan dengan etika, maka akan didapat bahwa perilaku buruk seseorang dianggap tidak buruk selama tindakan buruk tersebut tidak merugikan orang lain. Artinya asalkan dirinya senang, itu tidaklah menjadi masalah.

Berikutnya pragmatisme sekuler. Berarti ada pemisahan antara etika dan Tuhan. Menurut al-Attas ini disebut dengan sekuler.<sup>31</sup> Barangkali ini juga tak lepas dari sejarah,

---

<sup>29</sup> Fuad Mas'ud, *Menggugat Manajemen Barat*, Ed. II, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015), 87.

<sup>30</sup> K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. XI, 2011), 262.

<sup>31</sup> Al-Attas juga menyebut pensekuleran berarti juga suatu gerak-daya sejarah yang lambat laun tetapi pasti akan membebaskan masyarakat dan kebudayaan daripada terikat pada agama. Dimana ia adalah pedoman yang tetap dan kekal. Lihat: Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa, Cet. I, 2001), 198.

bahwa terdapat problem teks Bible.<sup>32</sup> Inilah yang kemudian menyebabkan pemisahan antara pengaruh geraja dan Kaisar.<sup>33</sup> Oleh karenanya, etika yang mempunyai hubungan dengan Tuhan pun juga dipisahkan dari perilaku manusia. Berarti etika bagi kaum pragmatis, menganggap beretika kalau mendatangkan manfaat. Bukan karena ada keterlibatan Tuhan atau tidak.

Terakhir etika dalam pragmatisme relatif. Sekilas ini mirip dengan relativisme.<sup>34</sup> "Everyone is wrong, nobody is right, nobody knows the truth, nobody knows," begitulah kira-kira ungkapan untuk aliran ini. Jika dihubungkan dengan etika atau moral, maka akan didapat bahwa tidak ada etika yang benar. Benar bila mendatangkan manfaat. Bahkan moral agama pun akan ditinggal apabila tidak mendatangkan manfaat bagi pelakunya.

Dengan demikian pada dasarnya katagori ini sangat dekat dengan prinsip materialisme. Sebab orientasi dari katagori ini secara esensi selalu kepuasan. Tidak ada salahnya manusia ingin mendapatkan manfaat dari segala sesuatu. Karena itu adalah sifat naluriah manusia. Namun, jika dalam prosesnya melanggar norma, etika, maka justru akan menyebabkan ketimpangan baik langsung atau tidak langsung.

## Fenomena Pragmatisme Politik di Indonesia

Pengertian pragmatisme seperti yang dijelaskan di atas, akan penulis khususkan pada aspek perilaku. Sebab memang pragmatisme tidak hanya digunakan untuk menilai kebenaran, tetapi juga etika atau perilaku. Dalam konteks ini, penulis akan mengaitkan dengan perilaku politik. Yaitu pada perilaku elit menjelang pemilu, pembentukan koalisi, dan perilaku elit politik saat menduduki kursi jabatan. Tentu dengan analisis berdasarkan kategori pragmatisme di atas.

<sup>32</sup> Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 29.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 28.

<sup>34</sup> Ini merupakan slogan generasi zaman *Postmodern* di Barat. Lihat: Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*, (Jakarta: INSISTS, Cet. II, 2012), 128.

## Pelaku Politik Menjelang Pemilu

Bagi elit politik, pemilu menjadi wadah utama dalam kontes politik. Berbagai cara dilakukan, mulai dari konser musik, pembagian sembako, pembagian baju dan atribut-atribut partai, baliho-baliho yang berisi *qoute* kandidat, pemasangan posko saat bencana dan yang lainnya.<sup>35</sup> Bahkan ada yang menggunakan jalan pintas seperti *money politics*.<sup>36</sup> Sehingga yang terjadi adalah kondisi yang disebut *politic is money*.<sup>37</sup> *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sebuah organisasi non-pemerintah mengungkapkan pada pemilu 2009, sebanyak 82 persen caleg melakukan praktek politik uang.

Sehubungan dengan itu, partai politik dalam mengusung calon di pilkada lebih mementingkan finansial dari calon bersangkutan.<sup>38</sup> Maka tidak heran anggaran besar pun dikeluarkan. Untuk seorang kepala daerah saja harus mengeluarkan biaya hingga puluhan miliar. Komisi Pemilihan Umum Bandung Barat, mengutip penelitian dari ICW ada sekitar 15 provinsi yang melakukan politik uang oleh para caleg.<sup>39</sup> Sedangkan pilkada serentak 2015, Bawaslu RI menemukan 929 laporan praktik politik uang.<sup>40</sup>

Sayangnya kasus tersebut tidak banyak berakhir di pengadilan. Padahal jelas praktik tersebut telah melanggar hukum.<sup>41</sup> Di samping

<sup>35</sup> M. Faishal Aminuddin, *Matc-All...*, 44.

<sup>36</sup> Bentuk politik uang yang dilakukan calon parlemen bermacam-macam, bisa dalam bentuk sembako, amplop berisi uang, kartu garansi, dan sejenisnya. Lihat: Tigor Hutapea, "Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu," dalam *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. VII, No. I, (T.K: T.P, 2015), 78.

<sup>37</sup> Dikutip dari paper Kaelan. M. S, dalam FGD Pakar II, *Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag*, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Kerjasama Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Jakarta, 09 November 2013, 31.

<sup>38</sup> Fitriyah, "Fenomena Politik Uang dalam Pilkada," dalam *Jurnal Politika*, Vol. III, No. I, (T.K: T.P, 2012), 1.

<sup>39</sup> Pada pileg 2014 Banten merupakan provinsi terbanyak dalam kasus politik uang, yaitu sebanyak 36 kasus, disusul Riau, Bengkulu, Sumatera Barat 31 kasus, Sumatera Utara 29 kasus, Jawa Barat 22 kasus. Lihat Laporan Hasil Penelitian KPU Bandung tentang praktek politik uang pada pemilu legislatif 2014.

<sup>40</sup> Sri Wahyu Ananingsih, "Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017," dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. XXXV, No. I, (T.K: T.P, 2016), 52.

<sup>41</sup> Pasal 84 dan Pasal 89 UU No. 8 tahun 2012 "Setiap pelaksanaan pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89, diberi sanksi pidana kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24.000.000,00." Pasal 89 berbunyi "Dalam hal terbukti pelaksanaan kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai

itu, tidak ada sikap kritis dari masyarakat turut menambah praktek politik uang. Banyak pihak yang seperti sudah lupa bagaimana dampak buruk dari praktik ini. Yaitu hasil pemilu tidak legitimasi, kemudian politisi yang terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas, bahkan mendaur ulang politisi korup, dan dapat menghalalkan masuknya sumber-sumber dana kotor.<sup>42</sup>

Dilihat pada aspek pragmatisme utilitarian, jelas ini merupakan pragmatisme. Sebab para elit politik dalam mencapai tujuannya, tidak mempertimbangkan baik buruk dari segi aturan. Melainkan dari hasil yang akan didapat. Yaitu harapan bahwa ketika elit politik memberi materi kepada rakyat, mereka akan mendapatkan hasilnya, yaitu suara rakyat. Sehingga orientasi elit ataupun parpol, bukan lagi ideologinya, melainkan bagaimana caranya untuk mendapat suara terbanyak dari rakyat.<sup>43</sup>

Kemudian jika ditinjau dari aspek lain, maka ia juga masuk dalam klasifikasi pragmatisme relatif. Yaitu adanya sebuah persepsi politik uang dalam pemilu atau pilkada dianggap sebagai perayaan, kultur, dan pragmatisme jangka pendek.<sup>44</sup> Persepsi ini kemudian yang dianggap penulis etika itu tidak tetap, dan tergantung siapa yang melihat dan yang melakukan.

## Pembentukan Koalisi

Andrew Heywood mengatakan, sebuah perilaku politik yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan praktis ketimbang tujuan bersifat ideologis.<sup>45</sup> Hal ini terjadi karena kepentingan partai guna mengamankan kebutuhan finansial partai, sekaligus mengamankan kekuasaan.<sup>46</sup> Meminjam istilah Kuskridho, aktivitas yang semacam ini

---

imbalan kepada peserta pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk: tidak menggunakan hak pilihnya; menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; memilih partai politik peserta pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

<sup>42</sup> Fitriyah, "Fenomena...", 8.

<sup>43</sup> Firman Noor, "Mencermati Kampanye Pileg 2009: Gradasi Peran Partai dan Gejala Pragmatisme," dalam Jurnal *Penelitian Politik*, Vol. VI, No. I, (T.K: T.P, 2009), 35.

<sup>44</sup> Fitriyah, "Fenomena..." 2.

<sup>45</sup> Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction*, (London: Macmillan Press, 1992), 317.

<sup>46</sup> Siska Yuspitarsari, "Sistem...", 27.

disebut dengan politik kartel.<sup>47</sup> Yaitu politik yang berorientasi untuk keuntungan pribadi, ketimbang memperjuangkan kepentingan publik. Konsekuensinya jelas sistem demokrasi berjalan tidak sesuai dengan cita-citanya.

Saat ini partai politik kian sulit untuk dibedakan. Publik hampir tidak bisa lagi mengkategorikan mana partai Islam, non-Islam, ataupun nasionalis, semuanya memiliki wajah yang sama.<sup>48</sup> Boleh dikatakan hampir seluruh partai merupakan partai pragmatis. Mereka rela mengesampingkan ideologi guna memperoleh keuntungan. Awalnya oposisi, kini berkoalisi dengan pihak lain. Begitu juga sebaliknya. Pemilu presiden 2009 partai Islam sepakat untuk berkoalisi. PKS, PAN, PKB, dan PPP mengusung pasangan SBY dan Boediono bersama Demokrat.<sup>49</sup> Mereka juga tergabung bersama 19 parpol lainnya. Setelah itu, Golkar memutuskan untuk bergabung bersama SBY.<sup>50</sup> Padahal sebelumnya Golkar bersikeras untuk bersikap oposisi terhadap SBY.

Sedangkan pada pemilu presiden 2014, partai Islam kembali terpecah. Hal ini disebabkan karena hasil pemilu didominasi oleh tiga kekuatan, PDIP, Golkar, dan Gerindra. Ketiganya masing-masing mengusung calon presiden, yaitu Jokowi, Aburizal Bakrie, dan Prabowo. Partai-partai lain pelan-pelan membangun komunikasi dengan partai dominasi tersebut. Sebut saja PKB menjalin komunikasi dengan PDIP, PPP dan PAN dengan Gerindra, sementara PKS mendekati Golkar.

Wacana ini pun pecah semenjak hanya ada dua kontestan. Prabowo<sup>51</sup>-Hatta bersama Golkar, PAN, PPP, PKS.<sup>52</sup> Sedangkan Jokowi-JK bersama PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem sebagai

<sup>47</sup> Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik...*, 22.

<sup>48</sup> Jainuri, dkk, *Catatan Politik di Tahun Politik*, (Malang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Cet. I, 2014), 10.

<sup>49</sup> R. Widya Setiadabudi Sumadinata, "Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014," dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol. II, No. II, (T.K: T.P, 2016), 186.

<sup>50</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet\\_Indonesia\\_Bersatu\\_II](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu_II) diunduh pada 11 Desember 2017, pukul 14. 20 WIB.

<sup>51</sup> Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan Koalisi enam partai ini terbentuk karena ada kesamaan visi misi yang ingin membangun dan menyelamatkan bangsa. Menurutnya masih banyak kekurangan dalam demokrasi yang sedang Indonesia bangun. <https://www.voaindonesia.com/a/parpol-dukung-pasangan-prabowo-hatta-dalam-pilpres/1917769.html> diunduh pada 11 Desember 2017 Pukul 12. 49.

<sup>52</sup> Koalisi ini kemudian diberi nama KMP (Koalisi Merah Putih).

koalisinya.<sup>53</sup> Di sini bisa dilihat bahwa partai dengan basis Islam, bersepakat untuk saling oposisi. Dalam prosesnya mata publik disuguhkan dengan suasana rusuh oleh para elit DPR. Tentu masih ingat bagaimana suasananya. Sebanyak 560 anggota bertarung, ricuh, demi mendapat posisi tertinggi di lingkungannya. Empat partai pendukung Jokowi *walk-out*. Beberapa kalangan menilai, proses pemilihan di parlemen adalah ajang balas dendam saat kalah di pemilihan presiden.<sup>54</sup>

Hasilnya KMP berhasil memenangkan seluruh jabatan ketua di parlemen. Mulai dari ketua MPR, DPR, DPD, hingga ketua-ketua komisi. KMP berkembang sebagai kelompok yang dominan dalam parlemen dan signifikan dalam pemerintahan.<sup>55</sup> Peta ini pun kembali berubah, partai Islam menyatakan berkoalisi dengan kubu KIH, yaitu PPP, PAN dan Golkar. Padahal sebelumnya partai ini oposisi.

Peristiwa tersebut menunjukkan ideologi partai politik, tidak dapat dijadikan sebagai hal yang utama. Terbentuknya koalisi didasarkan pada kepentingan politik bersifat *office seeking*.<sup>56</sup> KMP yang berpindah haluan menilai partainya tidak akan terakomodasi jika berada di luar kekuasaan pemerintah.<sup>57</sup>

Segala bentuk dinamika tersebut menunjukkan bahwa segenap partai berpikir keras bagaimana cara untuk memegang kekuasaan. Koalisi partai lebih mementingkan urusan pribadi. Pertarungan antar partai dan koalisi adalah bentuk demokrasi di Indonesia yang kurang mementingkan urusan publik. Lantaran partai politik harus disokong dengan finansial. Oleh karena itu, yang terjadi kemudian adalah jika ingin eksistensi partainya terjaga, maka memenangkan perlombaan menduduki kursi kekuasaan adalah solusinya.

Dari segi pragmatisme relatif, inkonsistensi dalam menjaga ideologi menjadikan sebuah parpol bersikap pragmatis. Sebab sampai hari ini, sulit rasanya membedakan, mana yang beraliran religius ataupun nasionalis. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik juga telah lepas dari cita-citanya. Bahkan jika sikap seperti ini

<sup>53</sup> Nama Koalisinya yaitu KIH (Koalisi Indonesia Hebat).

<sup>54</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/15292451/Di.Atas.DPR.Masih.Ada>. Rakyat diakses tanggal 30 November 2017. Jam 02.00.

<sup>55</sup> Serangkaian kemenangan dalam legislatif ini, meningkatkan posisi tawar KMP dan mereka muncul di dalam pemerintahan sebagai kekuatan yang dominan di parlemen. Meidi Kosandi, "Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014," dalam Jurnal *Politik*, Vol. I, No. I, 2015, 128.

<sup>56</sup> R. Widya Setiadabudi Sumadinata, "Dinamika Koalisi Partai-Partai...," 183.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 184.

terus dilakukan oleh para elit, maka tidak menutup kemungkinan kesejahteraan akan sangat lama dirasakan oleh rakyat.

### Perilaku Elit Politik saat Menjabat

Terpilihnya beberapa elit politik dalam perjalanannya juga tidak lepas dari ragam kasus, isu korupsi misalnya. Hingga tahun 2014, sebanyak 42 anggota DPR menjadi terdakwa korupsi, beberapa menteri ditahan, kasus mafia pajak, rekening gendut petinggi Polri, dinasti politik, dan masih banyak lainnya.<sup>58</sup> Menurut Warren seperti dikutip oleh Aqil, Korupsi dalam demokrasi merupakan sebetulnya eksklusif muka dua yang menguntungkan sebagian pihak dengan merugikan pihak-pihak lain yang dieksklusif dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif.<sup>59</sup> Masih teringat dalam pikiran kita beberapa kasus yang sempat menghebohkan negeri. Seperti Gayus Tambunan pelaku mafia pajak, membuat negara rugi hingga 1,7 T.<sup>60</sup> Selain itu ada Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Malaranggeng, Angelina Sondakh, dan lain sebagainya.

Barangkali benar apa yang dikatakan Mandrel Crighton. "Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely," ungkapannya seperti dikutip Adian Husaini.<sup>61</sup> Terjemahan bebasnya yaitu kekuasaan itu cenderung lebih dekat untuk melakukan korupsi. Ideologi, sistem nilai yang tidak cukup kuat menjadi faktor yang juga berpengaruh pada proses jalannya demokrasi.<sup>62</sup> Pendapat Olle Torngquist sebagaimana yang dikutip R. William Liddle menyatakan, demokrasi formal memang sudah terbentuk, tetapi secara substansial yang terjadi sesungguhnya adalah demokrasi kaum penjahat.<sup>63</sup>

Senada dengan itu, Haryatmoko berpendapat orang yang

---

<sup>58</sup> Muhammad Aqil Irham, *Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, Cet. I, 2016), 12-13.

<sup>59</sup> Muhammad Aqil Irham, "Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Pilkada Lampung," dalam *Jurnal Masyarakat*, Vol. XXI, No. I, (T.K: T.P, 2016), 35.

<sup>60</sup> Lies Sudibiyo dan Lamijan, "Korupsi di Bidang Perpajakan Suatu Bentuk Tindak Pidana Ekonomi," dalam *Jurnal Widyatama*, Vol. II, No. XXI, (T.K: T.P, 2012), 167.

<sup>61</sup> Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 30-31.

<sup>62</sup> Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah*, (Jakarta: Ushul Press, Cet. I, 2005), 133.

<sup>63</sup> R. William Liddle, *Pengantar Mengukir Demokrasi Indonesia*, dalam Ikrar Nusa Bankti dan Rizak Sihbudi, ed, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*, (Bandung: Mizan, 2001), 9-12.

terjun di dunia politik masih memiliki mentalitas *animal laborans*.<sup>64</sup> Yaitu orientasi yang ingin dicapai hanya untuk eksistensinya belaka, lebih tepatnya pada tubuh dan kodrat biologisnya. Para elit cenderung menjadikan politik sebagai tempat mata pencarian utama.<sup>65</sup> Korupsi politik mengindikasikan adanya penyalahgunaan amanat, kewenangan yang dipercayakan rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi.<sup>66</sup> Melihat kondisi ini, korupsi di Indonesia sudah menjadi semacam tradisi yang hampir ada di semua bidang.<sup>67</sup>

Semua kasus di atas juga mencerminkan sikap pragmatis para elit politik. Ditinjau dari pragmatis utilitarian, itu adalah caranya untuk mengembalikan uang yang telah dibelanjakan dalam proses pemilihan pada saat menjabat.<sup>68</sup> Dalam hal utilitarianisme, kenyataannya hampir semua perilaku di atas didasar oleh sikap untuk mendapat keuntungan dengan cara tidak mematuhi norma atau aturan, serta tidak menjalankan kewajibannya dengan sempurna.

Berkaca dari kategori yang lain, barangkali perilaku di atas juga disebabkan lantaran meninggalkan nilai-nilai agama (pragmatis sekuler). Alias perilaku yang tidak didasarkan pada ke-Tuhanan. Sehingga semangat reformasi yang telah berjalan satu dasawarsa lebih, justru terlihat semakin merosot.<sup>69</sup> Maka tidak ada salahnya mengatakan, perilaku pragmatis akan menjadikan cita-cita bersama semakin sulit untuk direalisasikan.

Tak hanya korupsi, dinasti politik juga menjadi wahana para elit untuk menjadi penguasa. ICW melalui data Kemendagri menyebut, sejak 2013 tercatat ada 58 dinasti politik di Indonesia. Kemudian dalam rentang 2010-2015 terdapat 183 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, enam di antaranya berkaitan dengan dinasti politik. Salah satunya adalah isu yang sempat mengguncang seantero negeri, kasus Ratu Atut Chosyiah di Banten. Setidaknya sembilan orang dari keluarga besarnya memimpin "kerajaannya" masing-masing.<sup>70</sup>

<sup>64</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, Cet. III, 2014), 1137.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 137.

<sup>66</sup> Iza Rumesten RS, "Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung," dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. XIV, No. II, (T.K: T.P, 2014), 354.

<sup>67</sup> *Ibid.*, 353.

<sup>68</sup> MB. Zubakhrum Tjenreng, *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Kemang, Cet. I, 2016), 80.

<sup>69</sup> Jainuri, dkk, *Catatan...*, 46.

<sup>70</sup> Alim Bathoro, "Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi," dalam

Berikut beberapa contoh bukti dinasti politik lain yang marak terjadi di Indonesia. Gubernur Jambi (2005-2010), dilanjutkan oleh anaknya yang menjadi gubernur (2016-2021), kemudian menantunya menjadi bupati (2011-2016). Gubernur Lampung (2007-2014), jabatan bupati Lampung dijabat oleh anaknya (2010-2015), sedangkan wakil bupati Pringsewu juga diisi oleh anaknya (2011-2016). Bupati Bangkalan (2013-Sekarang), sedangkan ayahnya juga menjadi bupati pada periode sebelumnya (2003-2012). Masih banyak lagi kasus yang serupa.<sup>71</sup> Kesan yang muncul kemudian yaitu sikap perilaku politik yang cenderung mementingkan diri sendiri.

Sama halnya seperti korupsi, dinasti politik nampaknya sudah menjadi budaya. Jika sudah menjadi budaya, tentu saja ia akan mengganggu demokratisasi secara keseluruhan.<sup>72</sup> Selain itu, praktik politik dinasti juga tidak sehat bagi demokrasi.<sup>73</sup> Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa cara itu hanya bertujuan mendapat keuntungan saat berkuasa. Hal ini mengingat kecenderungan manusia yang diberi amanah mengendalikan kekuasaan, melakukan tindakan yang melampaui batas dan sewenang-wenang.<sup>74</sup>

Akibatnya adalah, rakyat yang memberikan suaranya menjadi sengsara. Karena ternyata dinasti politik berdampak buruk pada penanggulangan kemiskinan di Indonesia.<sup>75</sup> Dapat dipastikan penyebabnya adalah sikap utilitarianisme yang sangat mengedepankan materialis. Pengaruhnya karena hanya mementingkan ego untuk pribadi dan golongannya.<sup>76</sup>

Selain itu, perilaku materialis juga mempunyai pengaruh pada etika politik yang meninggalkan nilai agama. Jika para elit sepenuhnya berpegang pada prinsip agama, maka kekuasaan akan dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak berorientasi pada manfaat pribadi, melainkan maslahat orang banyak. Sebaliknya, jika praktek

Jurnal *FISIP Umrah*, Vol. II, No. II, (T.K: T.P, 2011), 116.

<sup>71</sup> <http://news.liputan6.com/read/2799388/catatan-dinasti-politik-di-indonesia> diunduh pada 11 Desember 2017, pukul 00.12 WIB.

<sup>72</sup> Dewi Masitah, "Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015," dalam Jurnal *CISOC*, Vol. II, No. I, (T.K: T.P, 2015), 52.

<sup>73</sup> Alim Bathoro, "Perangkap...", 117.

<sup>74</sup> Muhammaf Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. I, 2010), 55.

<sup>75</sup> Sujarwoto, "Desentralisasi, Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia," dalam Jurnal *Administrasi Publik*, Vol. I, No. II, (T.K: T.P, 2015), 6.

<sup>76</sup> MAP-UGM, *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*, (Yogyakarta: Gava Media, Cet. I, 2009), 52.

semacam ini diteruskan, tanpa ada perasaan bahwa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan norma, maka yang terjadi kemudian adalah perilaku buruk tersebut dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Jika berlangsung dalam waktu yang lama, maka nalar kritik bangsa ini pun bisa bias.

### Pandangan Islam

Fenomena di atas memberi gambaran yang nyata bahwa cita-cita politik masih jauh dari harapan. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, akomodatif, responsif,<sup>77</sup> sebagaimana yang dikemukakan B.C Smith sepertinya hanyalah sebuah khayalan, atau kalau tidak berlebihan boleh dikatakan itu hanya ada di negeri mimpi. Misi reformasi yang mengusung tema pemerintahan yang lebih baik, justru terhambat jalannya.<sup>78</sup> Semua itu apalagi kalau bukan disebabkan oleh aktor politik kotor. Aktor politik merupakan peran penentu dalam baik atau tidaknya roda politik.<sup>79</sup> Berarti di samping sistem pemerintahan, perilaku juga menjadi penentu terhadap keberlangsungan hidup politik. Sistem yang baik tanpa perilaku yang baik, hanya akan menyebabkan perilaku sebagai formalitas tanpa nilai.

Memang, sikap pragmatis menyalahi semua aspek kehidupan termasuk politik. Meminjam pendapatnya Ahmad Tafsir, jika sikap pragmatisme dibiarkan justru akan membahayakan kemanusiaan, bahkan manusia itu sendiri.<sup>80</sup> Selain itu perilaku politik yang senantiasa pragmatis demi mempertahankan kekuasaan, akan menyebabkan sebuah model demokrasi semu.<sup>81</sup> Jika demokrasi itu semu, maka pastilah amanah konstitusi tidak akan terealisasi dengan baik. Akibatnya ketimpangan hidup dalam tataran masyarakat akan semakin lebar.

Jika demikian halnya, maka pada akhirnya sikap pragmatis yang diterapkan politikus akan merusak tatanan nilai dan norma. Islam tentu sangat melarang keras hal ini. Bagi Islam, politik tak hanya dipandang sebagai wadah untuk menunjukkan eksistensi.

<sup>77</sup> B.C Smith, *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*, (Boston: George Allen Uhwin, 1985), 3.

<sup>78</sup> Endang Komara, "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi," dalam *Jurnal Social Science Education*, Vol. II, No. II, (T.K: T.P, 2015), 117.

<sup>79</sup> Firman Noor, "Perilaku ...", 58.

<sup>80</sup> Ahmad Tafsir, *Filsafat...*, 217.

<sup>81</sup> Endang Komara, "Sistem...", 124.

Namun, Islam menganggap kekuasaan politik sebagai amanah yang harus selalu dijunjung dan dijaga.<sup>82</sup> Perilaku ini sudah pernah dilakukan oleh sahabat Rasul, Abu Bakar al-Shiddiq saat beliau diangkat menjadi pemimpin (khalifah). Pidatonya kira-kira begini.

“Sesungguhnya aku telah dikalungi tanggung jawab yang amat besar, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Maka dukunglah aku jika tindakanku benar, dan betulkan jika aku salah. Patuhilah aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun jika aku menyalahi perintah Allah, maka aku tidak perlu kalian patuhi.”<sup>83</sup>

Islam memang tidak memberi ajaran resmi mengenai sistem politik dan ketatanegaraan. Meskipun begitu, Islam mengatur asas-asas atau prinsip umum.<sup>84</sup> Berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis, diserahkan sepenuhnya kepada manusia untuk mengelola. Tentu dengan catatan tidak melanggar prinsip umum. Prinsip-prinsip itu di antaranya, amanah, prinsip kesamaan, keadilan yang merata, gotong royong, penegakan hukum, distribusi kekayaan secara merata.<sup>85</sup> Nilai-nilai tersebut kemudian menjadikan Islam sebagai agama yang penuh dengan etika. Sepatutnya hal-hal yang terdapat dalam etika harus selalu menjadi pegangan, baik individu maupun kelompok. Sehingga degradasi moral atau lunturnya iman dan takwa tidak terjadi.<sup>86</sup>

Secara mikro munculnya sikap pragmatis disebabkan kecenderungan pada materialis<sup>87</sup> dan hedonis. Dari kedua sifat ini,

<sup>82</sup> Syamsuddin Arif, *Islam dan Diabolisme Intelektual*, (Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations, Cet. I, 2017), 49.

<sup>83</sup> *Ibid.*, 50.

<sup>84</sup> Kata pengantar Mahfud MD dalam Muhammad Alim, *Asas...*, xi-xii. Munawir membagi perkembangan mengenai hubungan antara Islam dan politik. Pertama Islam adalah agama yang menyeluruh, sehingga dunia politik masuk dalam bagian Islam. Pandangan kedua, Islam hanya mengatur urusan vertikal, individu manusia dengan Tuhan. Terakhir Islam tidak memberi seperangkat sistem mengenai negara, namun memberikan seperangkat nilai yang bisa diterapkan dalam berbagai model ketatanegaraan. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. I, (Jakarta: UI Press, 1999), 1-2.

<sup>85</sup> Muslim Mufti, *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. I, 2015), 28-29.

<sup>86</sup> Yogi Prasetyo, “Adab Sebagai Politik Hukum Islam,” dalam *Jurnal Tsaqafah*, Vol. XIII, No. I, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2017), 94.

<sup>87</sup> Setidaknya dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu mengedepankan materi untuk mencapai hidup yang baik, bahagia dan sejahtera. Andi Muawiyah Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*, (Yogyakarta: LKiS, Cet. III, 2013), 98.

lalu muncul sikap utilitarianisme, perilaku bebas tanpa ada rambu-rambu agama (kemudian memisahkan antara perilaku dan nilai ke-Tuhanan), dan beranggapan pandangan baik dan buruk tidak tetap (tergantung siapa yang memandang), serta diringi rasa untuk mendapatkan hasil yang cepat (dengan orientasi jangka pendek).

Sikap pragmatisme dengan utilitarianisme melanggar prinsip dasar dalam Islam. Sebab bagi Islam, baik atau tidaknya perilaku bukan dilihat dari hasilnya. Melainkan dari sikap itu sendiri. Islam sangat mementingkan etos kerja, yaitu kerja yang mempunyai ikatan antara tujuan hidup dan ridha Allah.<sup>88</sup> Islam memiliki sikap seimbang antara material dan spiritual.<sup>89</sup> Selain itu, sikap memacu diri untuk berproses dan bekerja keras harus selalu ada pada setiap manusia.<sup>90</sup> Dengan demikian, Islam menganggap proses adalah bagian yang penting dari siklus kehidupan manusia.

Dalam konteks politik juga demikian, idealnya orientasi politik harus didasarkan pada fakta yang ada. Maksudnya, perilaku dipandang baik jika dalam prosesnya baik. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, paling tidak itu akan menjadi pelajaran untuk langkah selanjutnya. Untuk berpolitik lebih baik lagi, sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depan. Yang pasti harus selalu diiringi dengan aturan norma yang ada.

Selanjutnya, merupakan sebuah problem yang cukup krusial saat kaum pragmatis selalu memisahkan etika dan agama. Padahal Urgensi keterlibatan agama tak hanya sekadar berpengaruh pada keberlangsungan politik. Melainkan ia adalah kebutuhan mendasar dari manusia itu sendiri.<sup>91</sup> Orang yang tidak beragama, berarti hidup tanpa arah tujuan. Walaupun ia merasa berhasil dan nyaman dengan keadaannya, namun secara esensi ia gagal menjalankan misinya sebagai manusia. Sebab pada hakikatnya manusia terdiri

---

<sup>88</sup> Mohammad Irham, "Etos Kerja dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Substantia*, Vol. XIV, No. I, (T.K: T.P, 2012), 15.

<sup>89</sup> Saifulloh, "Etos Kerja Dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. III, No. I, (Surabaya: LPPM-ITS, 2010), 61.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> Karena pada hakikatnya manusia makhluk ciptaan Allah, bukan tercipta karena kebetulan. Sehubungan dengan itu, manakala manusia dalam menjalankan kehidupannya lalu menyimpang, seharusnya ia akan merasa bersalah atau berdosa. Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 159. Lihat: juga Siswanto, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis*, (Malang: Keben Perdana, 2013), 16.

dari tiga aspek. Yaitu hati,<sup>92</sup> jiwa (Nafs),<sup>93</sup> dan akal.<sup>94</sup> Ketiganya adalah satu kesatuan. Hati berkaitan dengan nilai spiritual, jiwa erat dengan nafsu, sedangkan akal menghendaki rasio dalam setiap kehidupannya. Maka sebagai konsekuensinya, hendaklah tiga aspek berjalan seiring, lalu diterapkan dalam segala hal termasuk politik.

Tak hanya itu, etika yang menurut pandangan pragmatis tidak tetap juga menyimpan masalah. Sebenarnya ini merupakan model lain dari paham relativisme. Agama (termasuk aspek etika di dalamnya) tidak lagi berhak mengklaim mempunyai kebenaran absolut.<sup>95</sup> Ia hanya dipahami sama dengan persepsi manusia sendiri yang relatif. Relativisme menurut Islam, justru akan merusak agama itu sendiri. Karena ia akan menyebabkan agama tidak memiliki peran dalam tatanan kehidupan.<sup>96</sup> Beragama menjadi sia-sia belaka, karena tidak ada kebenaran yang pasti sebagai pegangan.<sup>97</sup> Sama halnya dengan etika, etika tidak akan bisa menjadi sebuah pegangan dalam berperilaku jika relatif. Misalnya bisa saja perilaku membunuh itu baik, karena alasan pelaku itu bermanfaat bagi dirinya.

Islam tidak mentolerir hal yang demikian. Etika haruslah bersumber dari agama, bukan dari manusia apalagi berdasarkan manfaat.<sup>98</sup> Dalam politik pun demikian, menata politik mustahil bila tidak melibatkan agama. C.A Nallino sebagaimana dikutip oleh Nasihun Amin menilai, bahwa Nabi Muhammad selama hidupnya telah sukses membangun Islam sebagai agama dan politik secara harmonis secara bersamaan.<sup>99</sup>

Di samping itu, perilaku pragmatis yang mementingkan hasil jangka pendek juga patut dicermati. Islam memang tidak melarang

<sup>92</sup> Hati bertanggungjawab dalam menolong, mengawal dan mengendalikan stuktur dan elemen jiwa yang lain. Muhammad Hilmi Jalil, dkk, "Konsep Hati Menurut al-Ghazali," dalam Jurnal *Reflektika*, Vol. XI, No. XI, (T.K: T.P, 2016), 60.

<sup>93</sup> Jiwa bisa disebut juga sebagai nyawa, spirit, dan watak. Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 287.

<sup>94</sup> Akal memiliki fungsi penting dalam agama Islam. Kedudukannya dapat menilai suatu kebenaran, baik dalam menilai wahyu, perilaku dan lain sebagainya. Mukhtasar Syamsuddin, "Hubungan Wahyu dan Akal dalam Tradisi Filsafat Islam," dalam Jurnal *Filsafat*, Vol. I, No. II, (T.K: T.P, 2012), 127.

<sup>95</sup> Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis*, (Ponorogo: CIOS, Cet. II, 2010), 92.

<sup>96</sup> *Ibid.*, 72.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Joko Tri Haryanto, "Etika Islam Tentang Pemberitaan Politik di Indonesia," dalam Jurnal *YUDISIA*, Vol. VI, No. I, (T.K: T.P, 2015), 48.

<sup>99</sup> Nasihun Amin, *Paradigma Teologi Politik Sunni: Melacak Abu al-Hasan al-Asy'ari Sebagai Perintis Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajarm, Cet. I, 2015), 4.

setiap orientasi bersifat jangka pendek, asalkan saja tetap pada koridor dan tidak menerobos nilai-nilai dan norma. Yaitu dengan orientasi maslahat<sup>100</sup> serta berdimensi moral politis kehidupan manusia.<sup>101</sup> Perilakunya harus selalu amanah. Sebab amanah merupakan salah satu prinsip dasar saat seorang politikus dilantik untuk melaksanakan tugas dan menyelesaikan kewajibannya.<sup>102</sup>

Sehubungan dengan pandangan di atas, lalu bagaimana Islam menanggapi perilaku politikus pragmatis? Sebagaimana yang diketahui, Islam merupakan ajaran yang memuat segala macam aspek. Hal ini kemudian, memberikan sebuah justifikasi bahwa Islam adalah agama sempurna. Di mana setiap sisi, Islam telah mengaturnya guna mengantarkan manusia ke jalan bahagia berdimensi dua sekaligus, dunia dan akhirat.

Agar tidak bersikap utilitarian, Islam mengharuskan seseorang yang berpolitik memegang teguh aturan main. Sebab pada dasarnya, aturan mempunyai fungsi untuk mengantarkan manusia pada sesuatu yang ia cita-citakan.<sup>103</sup> Rasulullah pernah mengingatkan, saat seseorang menjadi pemimpin maka setidaknya ada tiga yang harus diperhatikan. *Pertama*, bila rakyat membutuhkan kasih sayang, maka pemimpin wajib berbagi kasih sayang kepada mereka. *Kedua*, apabila menghukum orang maka hendaklah secara adil. *Ketiga*, melaksanakan janji yang telah terucap.<sup>104</sup> Oleh karena itu, penting untuk melibatkan agama dalam rangka menghindari nafsu manusia yang terkadang melenceng.<sup>105</sup>

Selanjutnya agar tidak berperilaku memisahkan agama dan moral dalam berpolitik, maka wajib untuk memahami bahwa

<sup>100</sup> Dalam konteks Islam, yang termasuk dalam kategori maslahat mencakup: *Hifz al-din*, *Hifz al-Aql*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Mal*, dan *Hifz al-Nasb*. Kelima aspek ini, menurut Jasser Auda dapat meningkatkan sekaligus mengembangkan kehidupan manusia dalam segala aspek. Lihat: Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 249.

<sup>101</sup> Muh. In'amuzaahidin, "Etika Politik dalam Islam," dalam *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. II, No. II, (T.K: T.P, 2015), 92.

<sup>102</sup> *Ibid.*, 102.

<sup>103</sup> Didiek R. Mawardi, "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat," dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. XLIV, No. III, (T.K: T.P, 2015), 275.

<sup>104</sup> Kholili Hasib, "Konsep Siyasah dan Adab Bernegara Menurut Imam al-Ghazali," dalam *Jurnal Falasifa*, Vol. XVIII, No. I, (T.K: T.P, 2017), 9. Lihat juga Imam al-Ghazali, *Etika Berkuasa: Nasihat-Nasihat Imam al-Ghazali*, Terj. Arief B. Iskandar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1988), 23.

<sup>105</sup> Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semestra, Cet. I, 2006), 171.

keduanya saling bergantung. Karena keberadaan keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan manusia.<sup>106</sup> Agama mempunyai kaidah tertentu dalam hal memandang moral, sepatutnya harus diikuti, dan bukan sebaliknya, menentukan kaidah sendiri<sup>107</sup> dengan bertindak sesukanya. Pada dasarnya, memang kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.<sup>108</sup> Sungguh sesuatu yang mustahil apabila kedua aspek ini dicerai-beraikan antara satu dan lainnya.

Adapun untuk menghindari anggapan etika itu tidak tetap, maka penting untuk berperilaku Tauhid. Caranya dengan mempunyai patokan resmi, memegang teguh idealisme. Sebab perilaku nantinya akan ditimbang berdasarkan *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu.<sup>109</sup> Secara tidak langsung, cara ini menghendaki supaya setiap tindakan harus konsisten. Seperti yang dikonsepsikan oleh al-Ghazali, bahwa pemimpin dalam menjalankan roda politik harus berintegritas, serta melindungi rakyat dari kekerasan.<sup>110</sup> Maka dengan itu, sebetulnya seorang pemimpin (atau dalam konteks politik adalah semua pelaku politik yang mendapat mandat dari rakyat) mempunyai tujuan dan landasan yang jelas dalam mengantarkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Pemimpin juga harus bersikap adil serta tetap berada pada norma-norma yang ada, kemudian menghindar dari orientasi jangka pendek untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Yaitu dengan adanya persamaan antara orang yang tidak dikenal dan dikenal pada satu tempat. Memandang dengan neraca keadilan, tidak mengutamakan salah satu pihak. Sehingga tujuan akhirnya menghindari pergolakan sosial yang berakibat pada kerugian rakyat.<sup>111</sup>

## Penutup

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui jejak pragmatis dalam politik di Indonesia sangat *massive*. Hal tersebut dapat dilihat pada empat aspek penting. Yaitu perilaku politik yang hanya gencar

<sup>106</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 237.

<sup>107</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, Cet. I, 1997), xiii.

<sup>108</sup> Kholili Hasib, "Konsep...", 12.

<sup>109</sup> Kuntowijoyo, *Identitas...*, xx.

<sup>110</sup> Kholili Hasib, "Konsep...", 11.

<sup>111</sup> *Ibid.*, 11.

saat menjelang pemilu, pembentukan koalisi di jajaran eksekutif, perilaku politikus saat mendapat jabatan, ditambah dengan masalah dinasti politik.

Islam tentu melarang keras fenomena tersebut. Islam memandang perilaku di atas seharusnya tidak akan terjadi bila hakikat kekuasaan dapat dipahami secara penuh. Berkenaan dengan itu Islam mempunyai beberapa tawaran. Yaitu dengan memegang teguh aturan, ditambah dengan sebuah pemahaman antara moral dan politik saling bergantung, dilengkapi dengan paradigma tauhid, serta adil dalam setiap tindakan atau kebijakan.[]

### Daftar Pustaka

- Abdul, Basith, dkk. 2009. *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.
- Agustino, Leo dan Indah Fitriani. 2017. *Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.
- Auda, Jasser. 2007. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- al-Ghazali, Imam. 1988. *Etika Berkuasa: Nasihat-Nasihat Imam al-Ghazali*, Terj. Arief B. Iskandar, Bandung: Pustaka Hidayah.
- al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2001. *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa. Cet. I.
- Alim, Muhammaf. 2010. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKiS. Cet. I.
- Arif, Syamsuddin. 2017. *Islam dan Diabolisme Intelektual*. Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations. Cet. I.
- Artolahti, Toive, dkk. 1997. *Grolier: Encyclopedia of Knowledge*. Vol. XV. United States: Acamedic American Encyclopedia.
- Amin, Nasihun. 2015. *Paradigma Teologi Politik Sunni: Melacak Abu al-Hasan al-Asy'ari Sebagai Perintis Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.
- Ananingsih, Sri Wahyu. 2016. "Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017,"

- dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. XXXV. No. I.
- Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. Cet. IV.
- Black, Antony. 2006. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Jakarta: Serambi Ilmu Semestra. Cet. I.
- Bathoro, Alim. 2011. "Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi," dalam *Jurnal FISIP Umrah*. Vol. II. No. II.
- Bertens, K. 2011. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet. XI.
- Burk, Arthur W. 1958. *The Collected Papers of Charles Sanders Pierce*. Vol. III. Cambridge: Harvard University Press.
- Copleston, Frederick. 1966. *Contemporary Philosophy*. London: Cardinal Books.
- \_\_\_\_\_. 1966. *A History Philosophy*. London: Burns and Dates.
- Effendy, Bahtiar. 2005. *Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah*. Jakarta: Ushul Press. Cet. I.
- Fitriyah. 2012. "Fenomena Politik Uang dalam Pilkada," dalam *Jurnal Politika*. Vol. III. No. I.
- Hasib, Kholili. 2017. "Konsep Siyasah dan Adab Bernegara Menurut Imam al-Ghazali," dalam *Jurnal Falasifa*. Vol. XVIII. No. I.
- Haryanto, Joko Tri. 2015. "Etika Islam Tentang Pemberitaan Politik di Indonesia," dalam *Jurnal YUDISIA*. Vol. VI. No. I.
- Haryatmoko. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. Cet. III.
- Haris, Syamsuddin. 2014. *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Ed. I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Heywood, Andrew. 1992. *Political Ideologies: An Introduction*. London: Macmillan Press.
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat*. Jakarta: Gema Insani.
- Hutapea, Tigor. 2015. "Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu," dalam *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Vol. VII. No. I.
- In'amuzahidin, Muh. 2015. "Etika Politik dalam Islam," dalam *Jurnal Wahana Akademika*. Vol. II. No. II.
- Jalaluddin. 2012. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Irham, Mohammad. 2012. "Etos Kerja dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Substantia*. Vol. XIV. No. I.
- \_\_\_\_\_. 2016. "Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung," dalam *Jurnal Masyarakat*. Vol. XXI. No. I.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Cet. I.
- James, William. 1916. *Pragmatism: A New Name For Some Old Ways of Thinking*. Ed. I. London: Longmans.
- Jalil, Muhammad Hilmi, dkk. 2016. "Konsep Hati Menurut al-Ghazali," dalam *Jurnal Reflektika*. Vol. XI. No. XI.
- Jainuri, dkk. 2014. *Catatan Politik di Tahun Politik*. Malang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Cet. I.
- Keraf, Sonny. 1987. *Pragmatisme Menurut William James*. Yogyakarta: Kanisus. Cet. I.
- Khuza'i, Rodliyah. 2007. *Dialog Epistemologi Mohammad Iqbal dan Charles S. Pierce*. Bandung: Refika Aditama.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan. Cet. I.
- Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: KPG.
- Kuswana, Wowo Sunaryo. 2013. *Filsafat Pendidikan Teknologi, Vokasi dan Kejujuran*, Bandung: Alfabeta. Cet. I.
- Komara, Endang. 2015. "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi," dalam *Jurnal Social Science Education*, Vol. II. No. II.
- Kosandi, Meidi. 2015. "Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014," dalam *Jurnal Politik*, Vol. I. No. I.
- Labolo, Muhadam. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Ed. I. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. I.
- Liddle, R. William. 2001. "Pengantar Mengukir Demokrasi Indonesia," dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi, Ed. *Menjauhi Demokrasi kaum Penjahat*. Bandung: Mizan.
- MAP-UGM. 2009. *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*.

- Yogyakarta: Gava Media. Cet. I.
- Masitah, Dewi. 2015. "Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015," dalam *Jurnal CISOC*. Vol. II. No. I.
- Mas'ud, Fuad. 2015. *Menggugat Manajemen Barat*. Ed. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mawardi, Didiek R. 2015. "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat," dalam *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. XLIV. No. III.
- Mangunhardjana, A. 1997. *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z*. Yogyakarta: Kanisius.
- Minderop, Albertine. 2006. *Pragmatisme: Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*. Ed. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Meyer, Thomas. 2012. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung. Cet. III.
- Mufti, Muslim. 2015. *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*. Bandung: Pustaka Setia. Cet. I.
- Munir, Misnal. 2008. *Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer*. Yogyakarta: LIMA. Cet. I.
- Munitz, Milton K. 1981. *Contemporary Analytic Philosophy*. New York: Mcmillan Publishing Company.
- Noor, Firman. 2009. "Mencermati Kampanye Pileg 2009: Gradasi Peran Partai dan Gejala Pragmatisme," dalam *Jurnal Penelitian Politik*. Vol. VI. No. I.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi," dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol. XXIV. No. I.
- Nurdin, Fauziah. 2014. "Kebenaran Menurut Pragmatisme dan Tanggapannya Terhadap Islam," dalam *Jurnal Islam Futura*. Vol. XIII. No. II.
- Prasetyo, Yogi. 2017. "Adab Sebagai Politik Hukum Islam," dalam *Jurnal Tsaqafah*. Vol. XIII. No. I.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*.

Surabaya: Arkola.

- Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rizqiyanto, Saomi. 2015. "Kesepakatan Geneva Sebagai Bentuk Pragmatisme Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah," dalam *Jurnal Salam*. Vol. II. No. II.
- Ramly, Andi Muawiyah. 2013. *Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*. Yogyakarta: LKiS. Cet. III.
- Rorty, Richard. 2016. *Truth and Progress*, Cambridge: Cambridge University Press.
- R, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari. 2016. "Aliran Pragmatisme dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam," dalam *Jurnal Harati*. Vol. VII. No. XIII.
- S, Rumesten R. 2014. "Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung," dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. XIV. No. II.
- Sjadzali, Munawir. 1999. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Ed. I. Jakarta: UI Press.
- Smith, B.C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. Boston: George Allen Uhwin.
- Saifullah. 2010. "Etos Kerja Dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Sosial Humaniorah*. Vol. III. No. I.
- Sadulloh, Uyoh. 2007. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfa Beta.
- Siswanto. 2013. *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis*. Malang: Keben Perdana.
- Sujarwoto, "Desentralisasi, Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia," dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. I, No. II, 2015.
- Sudibiyo Lies dan Lamijan. 2012. "Korupsi di Bidang Perpajakan Suatu Bentuk Tindak Pidana Ekonomi," dalam *Jurnal Widyatama*. Vol. II. No. XXI.
- Sumadinata, R. Widya Setiadabudi. 2016. "Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014," dalam *Jurnal Wacana Politik*. Vol. II. No. II.

- Suseno, Franz Magnis. 1991. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Syamsuddin, Mukhtasar. 2012. "Hubungan Wahyu dan Akal dalam Tradisi Filsafat Islam," dalam *Jurnal Filsafat*. Vol. I. No. II.
- Tafsir, Ahmad. 2013. *Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. XX.
- Tjenreng, MB. Zubakhrum. 2016. *Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kemang. Cet. I.
- Zaprul Khan. 2016. *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer*. Ed. I. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. III.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2010. *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis*. Ponorogo: CIOS. Cet. II.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam*. Jakarta: INSISTS. Cet. II.

### Internet

- <https://plato.stanford.edu/entries/peirce/#bio>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet\\_Indonesia\\_Bersatu\\_II](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu_II)
- <https://www.voaindonesia.com/a/parpol-dukung-pasangan-prabowo-hatta-dalam-pilpres/1917769.html>
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/15292451/Di.Atas.DPR.Masih.Ada.Rakyat>
- <http://news.liputan6.com/read/2799388/catatan-dinasti-politik-di-indonesia>

